

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KANOREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN**

**Rindang Raharjo**

Progam Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[rindangkentod@gmail.com](mailto:rindangkentod@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study analyzes the implementation of subsidized fertilizer distribution policy in Kanorejo Village, Rengel District, Tuban Regency. The agricultural sector plays a strategic role in the national economy, but issues with subsidized fertilizer distribution, including scarcity and prices not aligning with the Highest Retail Price (HET), remain major obstacles for farmers. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the policy implementation has proceeded according to regulations and targeted farmer groups accurately; however, farmers' needs are not fully met due to quotas being insufficient for actual demands. Additionally, technical problems in policy execution persist due to inadequate coordination and cooperation among relevant actors (farmers, retailers, distributors, producers, and the government). This study recommends improvements to the distribution system, enhanced targeting accuracy, and strengthened inter-actor coordination to ensure effective and efficient availability of subsidized fertilizers.

**Keywords:** *Distribution, Public Policy, Subsidized Fertilizer, Farmers, Tuban*

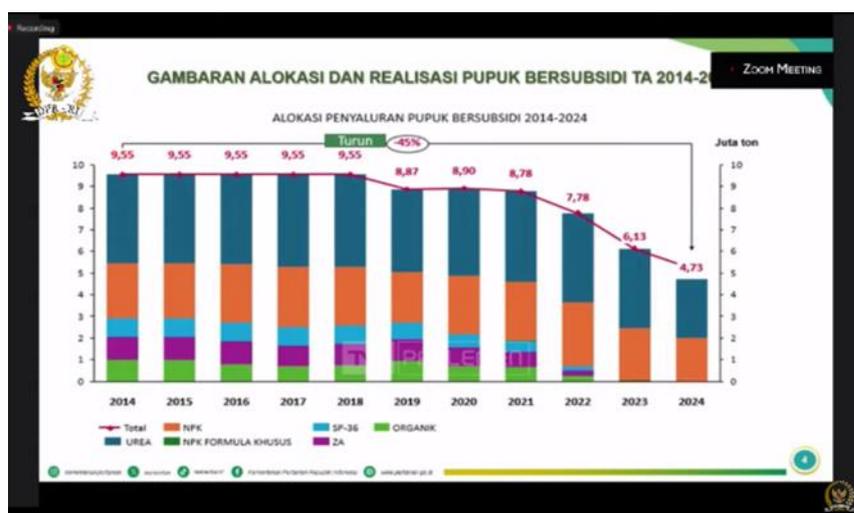
### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun permasalahan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kelangkaan dan harga yang tidak sesuai HET, masih menjadi kendala utama bagi petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada kelompok tani, namun kebutuhan petani belum sepenuhnya terpenuhi karena kuota yang kurang dari kebutuhan sebenarnya. Selain itu, masalah teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih muncul akibat kurangnya koordinasi dan kerjasama antaraktor terkait (petani, pengecer, distributor, produsen, dan pemerintah). Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem distribusi, peningkatan ketepatan sasaran, dan penguatan koordinasi antaraktor untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** *Distribusi, Kebijakan Publik, Pupuk Bersubsidi, Petani, Tuban*

## A. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang esensial untuk menghasilkan pangan dan bahan baku industri. Indonesia, sebagai negara agraris, sangat bergantung pada sektor ini, dengan Jawa Tengah sebagai salah satu penopang produksi beras nasional. Meskipun demikian, sektor pertanian di Indonesia belum menunjukkan hasil maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional, seringkali disebabkan oleh kurangnya perhatian serius dari pemerintah dalam bentuk proteksi, kredit, dan kebijakan yang menguntungkan.



Gambar 1. 1 Alokasi dan Realisasi Pupuk bersubsidi TA 2014 - 2024

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menambah alokasi pupuk bersubsidi dan membenahi tata kelolanya. Namun, berbagai permasalahan masih muncul, termasuk realisasi penyaluran yang rendah, permintaan penambahan jenis dan penerima, serta kegelisahan akan keberlanjutan program gas harga terjangkau. Penurunan produksi beras pada tahun sebelumnya juga disinyalir akibat persoalan ketersediaan dan aksesibilitas pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Kebijakan ini bertujuan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau demi kesejahteraan pangan nasional. Namun, permasalahan keterlambatan penyaluran, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di kios, dan praktik pengoplosan serta pemalsuan pupuk bersubsidi masih menjadi tantangan di lapangan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul: "Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban."

## B. LANDASAN TEORI

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga landasan teoritis utama yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merujuk pada proses di mana kebijakan diubah menjadi tindakan dan hasil yang nyata. Grindle (1980)

dalam Widodo (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua variabel utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

#### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

Aspek isi kebijakan mencakup beberapa elemen krusial yang menentukan seberapa mudah atau sulit suatu kebijakan diimplementasikan. Dalam konteks kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, elemen-elemen ini meliputi:

- a. **Kepentingan yang Terlibat (*Interest Affected*):** Sejauh mana kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan kelompok-kelompok tertentu (misalnya, petani, distributor, pengecer). Semakin banyak kepentingan yang bertentangan, semakin kompleks implementasinya.
- b. **Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of Benefits*):** Apakah manfaat kebijakan bersifat terpusat atau tersebar, serta apakah manfaat tersebut langsung dirasakan atau bersifat jangka panjang. Pupuk bersubsidi menawarkan manfaat langsung kepada petani.
- c. **Derajat Perubahan yang Diinginkan (*Extent of Change Envisioned*):** Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan dari status quo. Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi berusaha mengubah pola akses dan harga pupuk bagi petani.
- d. **Kedudukan Pembuat Kebijakan (*Location of Decision-Making*):** Posisi otoritas pembuat keputusan, apakah di tingkat pusat atau daerah. Kebijakan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai level pemerintahan.
- e. **Sumber Daya yang Disediakan (*Resources Committed*):** Ketersediaan sumber daya finansial, material, dan sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan. Ini mencakup alokasi anggaran subsidi, ketersediaan pupuk, dan petugas di lapangan.
- f. **Hubungan Ketergantungan (*Dependency Relationship*):** Tingkat ketergantungan antar aktor dalam proses implementasi. Distribusi pupuk bersubsidi melibatkan ketergantungan antara produsen, distributor, pengecer, kelompok tani, dan petani individual.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan untuk memahami pola, gejala, dan tingkah laku manusia yang lebih efektif diungkapkan melalui narasi daripada angka.

#### **Sumber Data:**

- a. **Data Primer:** Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam.
- b. **Data Sekunder:** Dikumpulkan dari literatur, buku, jurnal, dokumen, dan catatan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian, serta arsip terkait dan hasil dokumentasi.

#### **Teknik Pengumpulan Data:**

- a. **Wawancara:** Dilakukan secara tatap muka dengan pedoman wawancara berisi pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dari pihak terkait mengenai pengalaman dan pandangan mereka.

- b. **Observasi:** Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data, melakukan pengamatan, dan pencatatan sistematis.
- c. **Dokumentasi:** Pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, laporan, catatan, transkrip, dan surat kabar.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Kabupaten Tuban**

Kabupaten Tuban adalah salah satu dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, terletak di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa dengan luas 1.904,70 km<sup>2</sup> dan panjang pantai 65 km. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

##### **Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Kanorejo**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kanorejo, Bapak M. Suyanto, distribusi pupuk bersubsidi telah menasar kelompok tani, namun kebutuhan petani belum sepenuhnya terpenuhi. Permasalahan teknis muncul akibat kurangnya kerjasama antaraktor (petani, pengecer, distributor, produsen, dan pemerintah). Anggota kelompok tani, Bapak Wartono, juga mengeluhkan kuota pupuk yang didistribusikan kurang dari kebutuhan petani.

##### **Alokasi Pupuk Bersubsidi di Desa Kanorejo (Tahun 2025)**

- a. **Kelompok Tani Maju Makmur:** NPK 37.446 kg, Urea 41.136 kg, Organik 30.042 kg.
- b. **Kelompok Tani Sumber Makmur:** NPK 60.105 kg, Urea 66.009 kg, Organik 0 kg.
- c. **Kelompok Tani Harapan Makmur:** NPK 62.277 kg, Urea 68.484 kg, Organik 124.410 kg.
- d. **Kelompok Tani Sido Makmur:** NPK 42.672 kg, Urea 66.009 kg, Organik 13.824 kg.

Meskipun implementasi kebijakan sudah tepat sasaran kepada kelompok tani, koordinasi yang kurang optimal antar pihak terkait menghambat pemenuhan kebutuhan pupuk secara maksimal.

##### **Analisis Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana dan Penerima Kebijakan**

- a. **Kepatuhan Pelaksana:** Sebagian besar penyuluh dan aparat desa telah mengikuti prosedur distribusi pupuk, meskipun masih ada perbedaan pemahaman SOP.
- b. **Kepatuhan Penerima:** Petani menunjukkan kepatuhan tinggi dalam pengajuan RDKK, namun belum sepenuhnya memahami batasan kuota dan jenis pupuk subsidi.

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konsistensi kepatuhan dan kecepatan daya tanggap semua pihak. Penguatan kapasitas pelaksana, edukasi petani, dan sistem komunikasi dua arah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

#### **E. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, berdasarkan teori implementasi Grindle (isi kebijakan dan lingkungan implementasi), menunjukkan bahwa meskipun

penyaluran sudah tepat sasaran kepada kelompok tani, terdapat permasalahan pada pemenuhan kuota dan koordinasi antaraktor. Masalah teknis dalam pelaksanaan dan kurangnya pemahaman menyeluruh terhadap SOP oleh beberapa pelaksana, serta belum sepenuhnya pemahaman petani terhadap batasan dan ketentuan subsidi, menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, edukasi petani, dan sistem komunikasi dua arah yang lebih baik untuk mencapai efektivitas distribusi pupuk bersubsidi yang optimal.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi:

1. **Reevaluasi Kuota Alokasi Pupuk:** Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi ulang terhadap metode perhitungan kuota alokasi pupuk bersubsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual petani di lapangan, dengan mempertimbangkan luas lahan, jenis komoditas, dan pola tanam.
2. **Peningkatan Koordinasi Antar-Aktor:** Diperlukan upaya serius untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk, mulai dari produsen, distributor, pengecer, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, hingga kelompok tani. Pertemuan rutin, pembentukan forum komunikasi, dan penggunaan platform digital terpadu dapat memfasilitasi hal ini.
3. **Penguatan Kapasitas Pelaksana:** Pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai standar operasional prosedur (SOP) distribusi pupuk perlu diberikan kepada seluruh petugas di lapangan, termasuk penyuluh dan pengecer, untuk memastikan pemahaman yang seragam dan pelaksanaan yang konsisten.
4. **Edukasi dan Pemberdayaan Petani:** Petani perlu terus diberikan edukasi mengenai mekanisme pengajuan pupuk bersubsidi, batasan kuota, jenis pupuk yang disubsidi, dan hak-hak mereka sebagai penerima. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan intensif oleh penyuluh pertanian dan kelompok tani.
5. **Pengawasan yang Lebih Efektif:** Memperkuat sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk mencegah praktik penyelewengan, seperti harga di atas HET atau pengoplosan. Peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan perlu ditingkatkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, M. T. U. (2022). Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 356–363.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Jamil, A. (2022). *Petunjuk Teknis Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida-2023*.

- Karmeli, E., Fitryani, V., & Warokah, E. (2020). Optimalisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 146–154. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.566>
- Kementerian Pertanian. (2022). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2023*. Psp.Pertanian.Go.Id. <https://psp.pertanian.go.id/storage/1429/Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023.pdf>
- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi di Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(2), 118-129.
- Lisnawati. (2022). *Identifikasi Permasalahan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Studi Kasus di Desa X*. (Nama Jurnal/Lembaga jika diketahui).
- Mahya Hasinu Darapalgia, N. P., Aromatica, D., & Ekha Putera, R. (2021). Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-10.
- Masnun, M. A., & Astanti, D. N. (2020). Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 11-20.
- Regimun, Makmun, & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Agrin*, 24(2), 170-179.
- Widodo, E. (2007). *Manajemen Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Contoh sitasi untuk Grindle jika tidak ada di daftar pustaka asli skripsi Rindang, diasumsikan mengutip Grindle dari Widodo).